

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang pelaksanaan penelitian, rumusan masalah, sasaran penelitian hingga metode pelaksanaan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Permukiman merupakan lokasi tempat tinggal manusia yang terletak di area non-lindung serta dilengkapi oleh sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia. Pemahaman permukiman juga dapat diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas satu atau lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (*UU No 1 Tahun 2011*). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa permukiman merupakan kawasan yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat serta memiliki sarana prasarana penunjang kehidupan masyarakat. Selain itu permukiman sendiri merupakan kawasan yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga keberadaan sebuah permukiman saling berkaitan dengan permukiman lainnya baik dalam sisi positif seperti contoh saling mendukung fungsi masing-masing atau ikatan yang berbentuk negatif seperti contoh antar permukiman saling menimbulkan eksternalitas negatif.

Menurut Doxiadis dalam Kuswartojo, T., & Salim, S. (1997), permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lingkungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan tiga unsur: alam (tanah, air, udara), lingkungan (*shell*) dan jaringan (*networks*), sedang isinya adalah manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar dan di alam itulah diciptakan lingkungan (rumah, gedung dan lainnya) sebagai tempat manusia tinggal serta menjalankan fungsi lain. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa permukiman yang baik adalah ketika sebuah permukiman dapat mensinergikan 5 (lima) unsur yang telah disebutkan tersebut, namun pada penerapannya khususnya di Indonesia keselarasan antara 5 (lima) unsur tersebut menjadi sebuah persoalan. Hal ini dibuktikan dengan

berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2019 jumlah permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.431 Ha dengan target penanganan 14% dari luas total keseluruhan kawasan kumuh di Indonesia. Sedangkan pada program sebelumnya dengan rentan waktu antara tahun 2015-2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program KOTAKU telah menuntaskan 23.594 Ha kawasan kumuh. Pada dasarnya pengertian permukiman kumuh itu sendiri adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (*UU No 1 Tahun 2011*).

Salah satu bentuk penerapan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan implementasikan dalam bentuk Kep. Dir DJCK No. 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Kota Tanpa Kumuh. Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut menjadi dasar dalam penentuan lokasi kawasan yang ditetapkan mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk program NUSP-2.

Dalam menangani dan mengatasi persoalan permukiman kumuh, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah meluncurkan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)*. Tujuan pelaksanaan *NUSP-2* adalah untuk menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini merupakan pengembangan dari program *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSP)* yang berlangsung antara tahun 2005-2010 di 32 kota/kabupaten. Program ini akan memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam penyusunan rencana aksi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di daerah.

Berdasarkan SK Walikota Bandar Lampung Nomor 406/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung, terdapat 67 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Namun dalam hal ini dalam jangka waktu 2015-2018 hanya 17 kelurahan yang menerima bantuan program NUSP-2. Berdasarkan persentase yang ada dari 17 kelurahan penerima bantuan program NUSP-2, Kelurahan Kota Karang Raya merupakan kelurahan dengan persentase kepadatan permukiman kumuh tertinggi yakni 96,4% atau dari 22 Ha keseluruhan wilayah 21,2 Ha dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Tabulasi luas wilayah kumuh Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL I.1
LUAS PERMUKIMAN KUMUH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Kelurahan (Ha) | Luas Wilayah Kumuh (Ha) | Persentase Kumuh (%) | Keterangan |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Kedaton | Sukamenanti Baru | 28,32 | 17,75 | 62,7 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Kedaton | 103,87 | 82,73 | 79,6 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Wayhalim | Gunung Sulah | 96,35 | 77,7 | 80,6 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Jagabaya II | 98,35 | 74,95 | 76,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Sukarame | Way Dadi | 252,2 | 84 | 33,3 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Way Dadi Baru | 229,9 | 118 | 51,3 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Korpro Jaya | 186,8 | 67 | 35,9 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Sukabumi | Sukambumi | 268,9 | 133,2 | 49,5 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Campang Raya | 389,76 | 146,1 | 37,5 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Campang Jaya | 675,25 | 202,92 | 30,1 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Way Laga | 347,88 | 157,92 | 45,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Way Gubak | 562,17 | 112,32 | 20 | Menerima Program NUSP-2 |
| Tekuk Betung Timur | Kota Karang Raya | 22 | 21,2 | 96,4 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Kota Karang | 35,3 | 33,3 | 94,3 | Menerima Program NUSP-2 |
| Tekuk Betung Barat | Negeri Olok Gading | 109 | 74,2 | 68,1 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Batu Putu | 313,21 | 39,16 | 12,5 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Kelurahan (Ha) | Luas Wilayah Kumuh (Ha) | Persentase Kumuh (%) | Keterangan |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Panjang | Ketapang Kuala | 89,65 | 50,09 | 55,9 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Ketapang | 89,2 | 37,65 | 42,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Srengsem | 397,06 | 101,82 | 25,6 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Panjang Selatan | 94,29 | 82,17 | 87,1 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Panjang Utara | 116,19 | 112,38 | 96,7 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Pidada | 315,6 | 105,59 | 33,5 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Karang Maritim | 35,01 | 28,93 | 82,6 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Way Lunik | 275,15 | 205,99 | 74,9 | Menerima Program NUSP-2 |
| Bumi Waras | Bumi Waras | 73 | 56,76 | 77,8 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Kangkung | 30 | 27,7 | 92,3 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Garuntang | 109,24 | 64,41 | 59 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sukaraja | 79 | 11,53 | 14,6 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Bumi Raya | 83 | 55,32 | 66,7 | Menerima Program NUSP-2 |
| Teluk Betung Selatan | Pesawahan | 63 | 55,94 | 88,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Talang | 45 | 34,56 | 76,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Teluk Betung | 18,93 | 16,95 | 89,5 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Gedong Pakuon | 36 | 23,89 | 66,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Gunung Mas | 124 | 85,4 | 68,9 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sumur Putro | 92 | 47,49 | 51,6 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Teluk Betung Utara | Gulak Galik | 72,42 | 56,05 | 77,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sumur Batu | 88,09 | 53,03 | 60,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Tanjung Karang Barat | Sukajawa | 36,99 | 26,62 | 72 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sukajawa Baru | 55 | 9 | 16,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Tanjung Karang Timur | Kebon Jeruk | 25,01 | 17,91 | 71,6 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Kota Baru | 122,98 | 79,75 | 64,8 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Sawah Brebes | 31 | 23,82 | 76,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sawah Lama | 12,46 | 9,31 | 74,7 | Menerima Program NUSP-2 |
| Kedamaian | Tanjaung Agung Raya | 15 | 4,41 | 29,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Bumi Kedamaian | 144,01 | 40,8 | 28,3 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Kelurahan (Ha) | Luas Wilayah Kumuh (Ha) | Persentase Kumuh (%) | Keterangan |
|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Kedamaian | 171,98 | 25,68 | 14,9 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Tanjung Baru | 144,5 | 82 | 56,7 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Tanjung Senang | Tanjung Senang | 151,83 | 103,2 | 68 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Kemiling | Kemiling Permai | 79 | 53,28 | 67,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Kemiling Raya | 267 | 99,31 | 37,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Beringin Jaya | 240,36 | 129,83 | 54 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Sumber Agung | 498 | 125,45 | 25,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Kedaung | 576,95 | 40,08 | 6,9 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Pinang Jaya | 194,98 | 32,75 | 16,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Tanjung Karang Pusat | Gotong Royong | 41,63 | 74,27 | 178,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Durian Payung | 108,74 | 23,1 | 21,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Palapa | 32,59 | 44,06 | 135,2 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Kelapa Tiga | 118,74 | 28,3 | 23,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Pasir Gintung | 29,9 | 28,3 | 94,6 | Menerima Program NUSP-2 |
| | Kaliawi | 49,05 | 36,21 | 73,8 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Kaliawi Persada | 22 | 14,83 | 67,4 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Enggal | Tanjung Karang | 28 | 24,1 | 86,1 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Gunung Sari | 21 | 16,7 | 79,5 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Rajabasa | Gedong Meneng | 194 | 57,5 | 29,6 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Rajabasa Nunyai | 147,01 | 74 | 50,3 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Rajabasa Raya | 358 | 98,4 | 27,5 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| | Rajabasa Jaya | 359 | 69,22 | 19,3 | Tidak Menerima Program NUSP-2 |
| Total | | 10,318,54 | 4,365,25 | | |

Sumber: SK Walikota Bandar Lampung Nomor 406/III.24/HK/2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 110/KPTS/DC/2016 Tentang Penetapan Lokasi Kota Tanpa Kumuh

Proses pelaksanaan program NUSP-2 juga memerlukan evaluasi guna menilai hasil dari program tersebut, hal ini dilakukan karena program NUSP-2 merupakan salah satu program prioritas guna menangani masalah permukiman kumuh di Indonesia sehingga penilaian ketercapaian hasil dapat menjadi sebuah tolok ukur keberlangsungan program tersebut. Evaluasi yang dilakukan juga dapat menjadi saran terhadap pelaksanaan program NUSP-2 kedepannya. Hal ini sesuai

dengan salah satu fungsi evaluasi yakni, fungsi pengukuran keberhasilan, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu program baik dari metode yang digunakan, penggunaan saran dan pencapaian tujuan. Selain itu NUSP-2 juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan infrastruktur permukiman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 9 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 diuraikan bahwa permasalahan dari sudut pandang pekerjaan umum dan relevan dengan skala kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat infrastruktur jalan lingkungan yang rusak;
- b. Drainase banyak yang tersumbat;
- c. Tingkat pelayanan sanitasi tidak memadai;
- d. Akses sarana air bersih masih rendah;
- e. Sarana dan pengelolaan sampah belum memadai;
- f. Penataan lingkungan kumuh dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, air bersih, dan sanitasi.
- g. Masih sering terjadi genangan di titik-titik tertentu; dan
- h. Sistem informasi pengelolaan infrastruktur perkotaan datanya belum update, tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan;

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang ditilik dari sudut pandang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yakni:

- a. Perlunya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat.
- b. Timbulnya beberapa kawasan permukiman liar (*squatter area*) disempadan pantai dan sungai serta beberapa kawasan yang pertumbuhannya tidak memenuhi aspek kesehatan dan perencanaan kota.
- c. Masih rendahnya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh pengembang.

d. Perlunya peningkatan fungsi koordinasi antara organisasi perangkat daerah penyelenggara kegiatan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan program pembangunan.

Selain itu secara spesifik juga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 Kelurahan Kota Karang Raya hingga tahun 2016 ditetapkan sebagai kelurahan siap siaga bencana di Kota Bandar Lampung oleh BPBD Kota Bandar Lampung. hal ini menjadikan bahwa NUSP-2 yang dilakukan di Kota Bandar Lampung dan secara mikro di Kelurahan Kota Karang Raya selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas permukiman sesuai dengan tujuan utama NUSP-2, namun selain itu NUSP-2 juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman yang terurai dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Berdasarkan uraian diatas maka evaluasi terhadap program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya perlu dilaksanakan sehingga peneliti tertarik membuat sebuah penelitian dengan tema evaluasi yang berjudul: **Evaluasi Implementasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur).**

1.2 Rumusan Masalah

Program NUSP-2 yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu dari bentuk nyata dari peningkatan kualitas permukiman yang ada di Indonesia. Hal ini juga merupakan sebuah langkah dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. NUSP-2 yang merupakan salah satu bentuk program yang berada dalam lingkup KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan di 20 Kab/Kota di Indonesia.

Tujuan dari dilakukannya sebuah program pengentasan kawasan kumuh adalah untuk menjadikan kawasan tersebut lebih baik dari berbagai aspek. Sehingga dalam hal ini perlu dan penting dilakukan penilaian hasil dari program *NUSP-2*

yang dilakukan di Kelurahan Kota Karang Raya mengingat kondisi kawasan yang cukup rentan terdampak dampak negatif yang dihasilkan oleh keberadaan permukiman kumuh tersebut. Evaluasi yang dilakukan juga dapat menentukan arahan keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan mengenai kondisi kawasan Kelurahan Kota Karang Raya beserta kondisi kekumuhan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang penelitian ini sehingga memunculkan sebuah rumusan masalah seperti dibawah ini:

Mengidentifikasi arah keberhasilan dari pelaksanaan serta kesulitan pada tahap pasca pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur). Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut menghasilkan sebuah pertanyaan besar penelitian dibawah ini:

- Bagaimana capaian dari program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* tahun 2016-2018 di Kota Bandar Lampung dengan Studi Kasus di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada latar belakang penelitian serta rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- Mengukur arah keberhasilan program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya berdasarkan aspek dampak dan keberlanjutan program.

Terdapat beberapa sasaran capaian penelitian yakni:

- a) Mengidentifikasi fokus pelaksanaan evaluasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kelurahan Kota Karang Raya.
- b) Mengidentifikasi parameter dan metode pelaksanaan Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kelurahan Kota Karang Raya.
- c) Merumuskan evaluasi implementasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kelurahan Kota Karang Raya.

TABEL I.2
POSISI SASARAN PADA PENELITIAN

| No. | Sasaran | Posisi Sasaran |
|-----|--|--|
| 1 | Mengidentifikasi fokus pelaksanaan evaluasi program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)</i> di Kelurahan Kota Karang Raya. | Berada pada Bab 2 (dua) bagian uraian penjelasan mengenai bentuk evaluasi, kawasan kumuh serta program NUSP-2. |
| 2 | Mengidentifikasi parameter dan metode pelaksanaan Evaluasi Program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)</i> di Kelurahan Kota Karang Raya. | Berada pada Bab 2 (dua) pada uraian tentang penentuan variabel yang dilakukan dengan melakukan sintesa terhadap beberapa variabel serta berada pada Bab 1 yang diuraikan dalam metode penelitian hingga teknik pengolahan dan analisa data |
| 3 | Merumuskan evaluasi implementasi program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)</i> di Kelurahan Kota Karang Raya. | Perumusan evaluasi berada pada Bab 4 (empat) yang diuraikan dalam sebuah analisa yang dilakukan dengan mempertimbangkan parameter dan metode yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. |

Sumber: Peneliti, 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan dampak dan manfaat dalam ranah perencanaan wilayah dan kota khususnya dalam pemberdayaan kawasan kumuh perkotaan. Selain itu penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat fokus terhadap evaluasi penanganan permukiman kumuh melainkan dapat menambah penelitian dan pengetahuan mengenai evaluasi dari kebijakan publik.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan kawasan kumuh. Serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kawasan permukiman kumuh perkotaan terutama

pertimbangan dari sudut pandang dampak dan keberlanjutan program. Evaluasi dampak dengan aspek fisik dan non fisik akan menghasilkan penggambaran mengenai arah kecenderungan keberhasilan program ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan sisi sosial ekonomi yang dihasilkan. Sedangkan dari aspek berkelanjutan diharapkan dapat menggambarkan *spillover effect* dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemrakarsa kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang lebih baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan sub-bab mengenai cakupan penelitian baik dari sudut spasial dan materi kajian serta lingkup waktu.

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini mencakup 2 (dua) lingkungan dan 15 Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di wilayah Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini bertemakan evaluasi program kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan fokus kepada nilai dampak dan keberlanjutan yang ditimbulkan oleh program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun pasca terselesaikannya program di wilayah tersebut. Dibawah ini merupakan tabulasi pertimbangan dasar dalam pemilihan nilai dampak dan keberlanjutan dalam pelaksanaan evaluasi ini.

TABEL I.3
DASAR PEMILIHAN MATERI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN
DALAM EVALUASI NUSP-2 DI KELURAHAN KOTA KARANG RAYA

| Dampak | Kebertlanjutan |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Salah satu bentuk evaluasi adalah melihat dampak program (SK/DJCK/ No. 40 Tahun 2016) ❖ Evaluasi program pada tahap ex-post adalah melihat pencapaian tujuan dan dampak dari program. (Wollman, 2007) ❖ Salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengetahui dampak dari kebijakan. (Bappenas, 2009) ❖ Rentang akhir pelaksanaan program dan penelitian berjarak ± 3 Tahun sehingga dirasa belum relevan untuk menilai tujuan secara keseluruhan. | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tercantum dalam tujuan program NUSP-2 (<i>Guidelines NUSP-2</i>) ❖ Masuk dalam salah satu prinsip penanganan dan pencegahan permukiman kumuh (panduan Penyusunan RP2KPKP) ❖ Menjadi agenda dalam implementasi RPJMN 2015-2019 ❖ Tercantum dalam prinsip pelaksanaan Kotaku dan NUSP-2. (SK/DJCK/ No. 40 Tahun 2016 dan <i>Guidelines NUSP-2</i>) |

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Pelaksanaan evaluasi dampak berporos pada dampak fisik dan non fisik dari program NUSP-2, dimana dampak fisik mengacu pada indikator infrastruktur permukiman kumuh yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2016 yang disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah kajian serta dampak non fisik yang mengacu pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh program NUSP-2 terhadap Kelurahan Kota Karang Raya. Selain itu penilaian evaluasi dari sudut pandang berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Penilaian keberlanjutan dengan pertimbangan ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan arah keberlanjutan dari hasil program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya.

TABEL I.4
POIN PENILAIAN DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
NUSP-2 DI KEL. KOTA KARANG RAYA

| | | |
|--------|-------|--|
| Dampak | Fisik | ❖ Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan. |
|--------|-------|--|

| | | |
|---------------|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan pengelolaan limbah. ❖ Peningkatan pengelolaan persampahan. ❖ Peningkatan kualitas SPAM. ❖ Peningkatan kualitas drainase. |
| | Non Fisik | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sosial (identifikasi timbulnya kegiatan sosial baru). ❖ Ekonomi (identifikasi timbulnya kegiatan ekonomi baru). |
| Keberlanjutan | Sosial | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat mampu mengelola hasil program secara swadaya. ❖ Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan hasil dari program. |
| | Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan harga lahan. ❖ Identifikasi pengeluaran masyarakat karena hasil program diluar biaya operasional dan pemeliharaan |
| | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penerapan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>) ❖ Identifikasi kegiatan masyarakat terkait dengan reduksi penggunaan energi. |

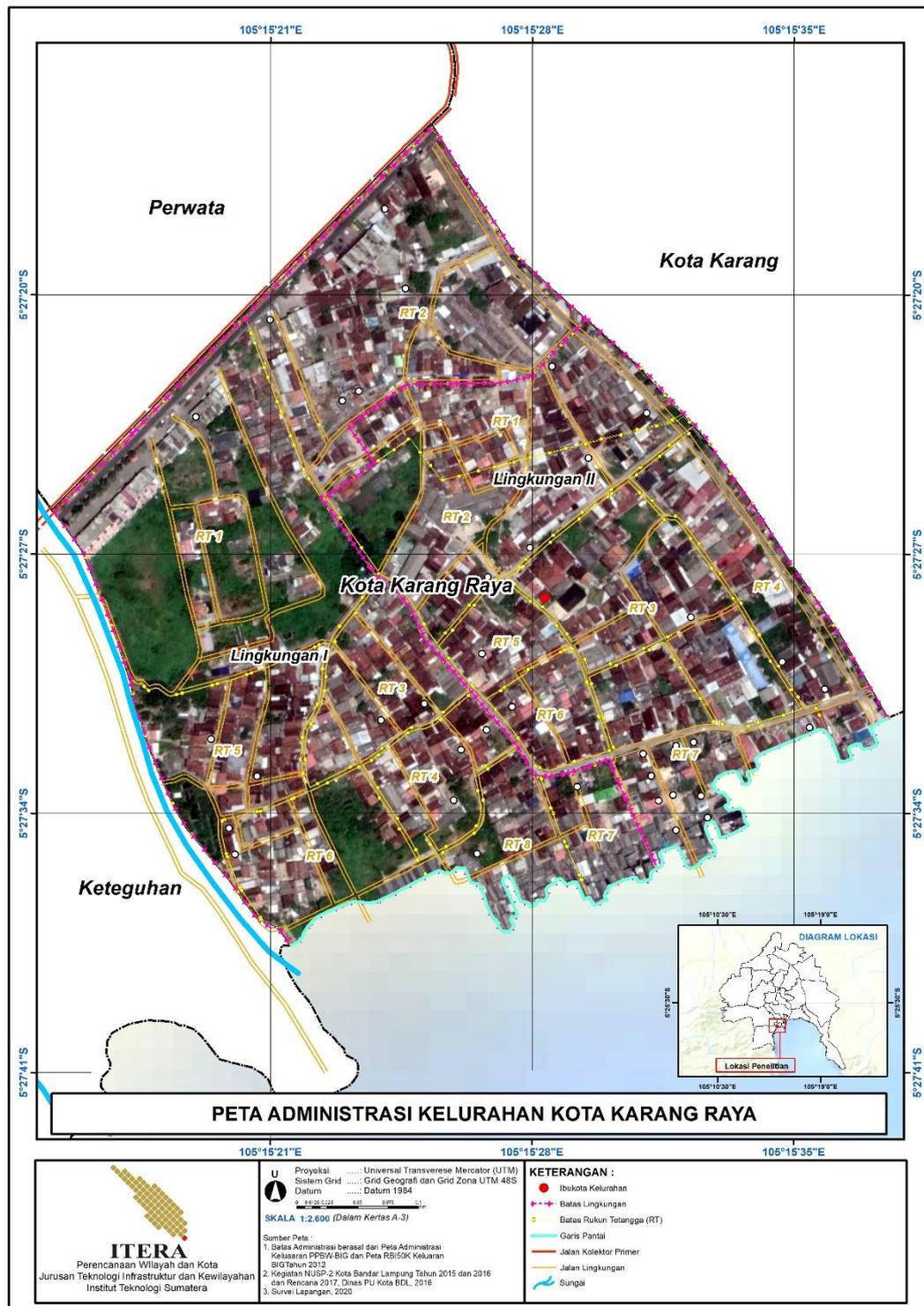
Sumber: Hasil Analisa, 2021

1.5.3 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini berfokus untuk melihat bentuk dampak dan keberlanjutan yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2021, dibawah ini merupakan *timeline* pelaksanaan penelitian.

TABEL I.5 TIMELINE PELAKSANAAN PEKERJAAN

| Tahap Pelaksanaan | Agu-20 | Sep-20 | Okt-20 | Nov-20 | Des-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | Mei-21 | Jun-21 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Identifikasi fokus pelaksanaan evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Penentuan tujuan evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Pengumpulan data awal | | | | | | | | | | | |
| Studi literatur terkait evaluasi implementasi | | | | | | | | | | | |
| Identifikasi parameter dan metode pelaksanaan evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan desain evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Sintesa variabel | | | | | | | | | | | |
| Penentuan metode evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan perangkat survei | | | | | | | | | | | |
| Diskusi rencana evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Diskusi keselarasan tema dan desain evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Penentuan pelaku evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Merumuskan evaluasi implementasi | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Survei primer dan sekunder | | | | | | | | | | | |
| Analisa data | | | | | | | | | | | |
| Perumusan hasil evaluasi | | | | | | | | | | | |
| Perumusan rekomendasi didasarkan pada hasil analisa | | | | | | | | | | | |

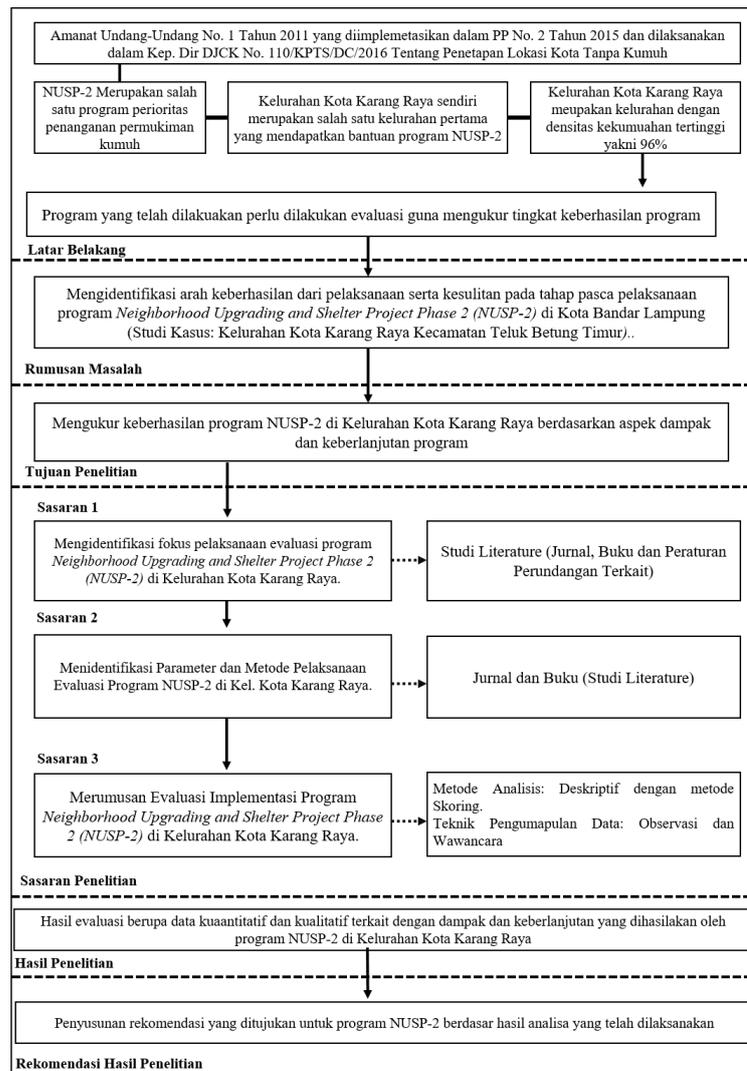


Sumber: Peta RBI50K Kota Bandar Lampung dan Citra Google Earth, 2021 (diolah)

GAMBAR 1.1 DELINEASI WILAYAH PENELITIAN

1.6 Kerangka Berpikir

Evaluasi program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang Raya diawali dengan uraian perihal latar belakang yang membahas mengenai dasar penentuan penelitian serta dasar dalam mengambil lokasi studi kasus. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut diturunkan kembali kedalam rumusan masalah yang kemudian diimplementasikan pada tujuan penelitian. Namun dalam mencapai tujuan penelitian tersebut terdapat beberapa sasaran capaian menjadi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Selain itu kerangka berpikir juga menguraikan alur pencapaian hasil setiap sasaran hingga menjawab tujuan utama penelitian.



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.2
KERANGKA BERPIKIR

1.7 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi acuan dan pembanding dalam perkembangan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dalam penulisan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

**TABEL I.6
PENELITIAN TERDAHULU**

| No | Referensi | Nama Penulis | Judul | Fokus Penelitian | Lokasi Studi | Metode Penelitian |
|----|-----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Jurnal | Bani Yulianti Dkk (2015) | Evaluasi Penataan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta | Evaluasi terhadap program peremajaan kota yang dilaksanakan | Kota Yogyakarta | Deskriptif Mix Metode |
| 2 | Jurnal | Ratih Widyanti Dan Weni Roswana | Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung | Evaluasi Dengan 6 Kriteria Evaluasi Berdasarkan William Dun | Kab Tulung Agung | Deskriptif Kualitatif |
| 3 | Jurnal | Intania Irfani Dan F. Winarni | Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta | Penilaian EfektIVitas Dengan Menggunakan Indikator Yang Dikemukakan Oleh Riant Nugroho | Kelurahan Karangwaru Yogyakarta | Deskriptif Kualitatif |
| 4 | Jurnal | Alforina Heru Fahriza Dan Indah Prabawati | Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatanperbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan tegalsari Kota Surabaya | Evaluasi Dilakukan Dengan Menggunakan Indikator Evaluasi Yang Dikemukakan Oleh William Dunn | Kota Surabaya | Deskriptif Kuantitatif |
| 5 | Jurnal | Puji Astuti Dan Wiwik | Evaluasi Kebijakan Revitalisasi | Evaluasi Dengan Didasarkan Pada | Kabupaten Semarang | Deskriptif Kualitatif |

| No | Referensi | Nama Penulis | Judul | Fokus Penelitian | Lokasi Studi | Metode Penelitian |
|----|-------------|------------------------------|---|--|--------------------|-----------------------|
| | | Widyanti (2012) | Bangunan Cagar Budaya Benteng Willem II Ungaran | Peraturan Perundangan Dan Tujuan Awal Pengadaan Sebuah Program | | |
| 6 | Jurnal | Wisko Dwi Nurjiansyah (2016) | Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Di Kota Surabaya | <ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan hasil penilaian tentang efektivitas dari pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya - Mendeskripsikan hasil penilaian tentang efisiensi dari pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya | Kota Surabaya | Deskriptif Kualitatif |
| 7 | Tugas Akhir | Anggi Lestari (2019) | Evaluasi Program Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2 Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kelurahan Kungkung Kecamatan Bumi Waras) | Indikator Evaluasi Yang Dikemukakan Oleh William Dunn | Kelurahan Kungkung | Deskriptif Kualitatif |

Sumber: Peneliti, 2020

Penelitian ini membandingkan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik jurnal, tugas akhir maupun sumber lainnya yang memiliki kedekatan kesesuaian dengan penelitian peneliti. Pada keaslian penelitian ini dilakukan sejumlah perbandingan baik judul, topik, fokus penelitian, metodologi yang digunakan hingga lokasi studi kajian penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan tidak terlihat memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menggunakan merupakan penelitian deduktif dengan pendekatan *Mix Methode*, penjabaran akan berfokus pada indikator dampak serta keberlanjutan yang dihasilkan profram terhadap wilayah objek penerima bantuan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixing Methodology* yakni menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan karena menurut Mulyadi (2011) penelitian sosial yang hanya menggunakan pendekatan kuantitatif saja tidak akan mempunyai makna, karena hanya menghasilkan angka-angka. Begitupun sebaliknya jika penelitian itu hanya menggunakan pendekatan kualitatif saja, maka hasilnya hanya berupa narasi atas fakta empirik yang kemungkinan datanya berupa kalimat bisa direkayasa. Menurut Bryman (1988) terdapat 4 (empat) model dalam menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu:

- a. Penelitian kualitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif.
- b. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif.
- c. Kedua pendekatan diberikan bobot yang sama.
- d. Triangulasi.

Dalam penelitian ini tipe deskriptif digunakan untuk meringkas berbagai variabel yang terdapat dimasyarakat yang menjadi objek penelitian yang pada hal ini tindakan tersebut dikaitkan dengan evaluasi implementasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan *Mixing Methodology* (gabungan kualitatif dan kuantitatif) dengan model penelitian kuantitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif.

1.9 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Jenis Data

a. Data Primer

Berdasarkan Sugiyono (2015), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara serta menyebarkan angket yang berkaitan dengan evaluasi program *Neighborhood Upgrading*

and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur.

b. Data Sekunder

Berdasarkan Sugiyono (2015), data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini data sekunder yang diperlukan adalah data mengenai pelaksanaan program *NUSP-2* yang berada pada kelurahan Kota Karang Raya maupun Kota Bandar Lampung.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) pengertian teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pendataan untuk menggali data yang dibutuhkan pada studi ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2014), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan pertimbangan yang dibenarkan secara kaidah akademis beserta Hasil Analisa awal dari surveyor (Pontoh, 2013). Jenis sampling ini memungkinkan surveyor menganalisis terlebih dahulu karakteristik calon responden yang diinginkan. Pemilihan responden yang tepat akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan responden dengan memperhatikan pengalaman dan keterlibatan dalam program *NUSP-2* di Kota Bandar Lampung dan Kelurahan Kota Karang Raya. Kriteria pemilihan responden berdasarkan Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi, sehingga tidak hanya diketahui tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- c. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- d. Mereka yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi.

- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

TABEL I.7
PEMILIHAN RESPONDEN PENELITIAN

| Responden | Alasan Pemilihan |
|---|--|
| Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung | - Responden memahami konteks program yang dijadikan bahan evaluasi - Responden ahli dalam perumusan kebijakan |
| Pihak Kelurahan Kota Karang Raya | - Responden mengetahui kondisi wilayah studi - Responden merupakan pemegang kebijakan kelurahan |
| Koordinator LKM Kelurahan Kota Karang Raya | - Responden merupakan koordinator penyelenggaraan program |
| Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan Kota Karang Raya | - Responden mengetahui kondisi wilayah secara mendetail - Responden dapat dijadikan sebagai perwakilan masyarakat dan target penerima bantuan |
| Tokoh Masyarakat* | - Responden mengetahui kondisi wilayah secara mendetail - Responden dapat dijadikan sebagai perwakilan masyarakat dan target penerima bantuan |

*) Keterangan: Optional saat dirasa data yang didapatkan perlu mendapatkan konfirmasi yang lebih mendetail

Sumber: Hasil Analisa, 2020

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang berarti mengumpulkan data langsung dari sumber dan dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data primer yakni:

- **Wawancara**

Berdasarkan P. Joko Subagyo (2011:39) adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Pemilihan teknik wawancara terstruktur karena dirasa lebih efektif dalam menghimpun informasi serta membuat kegiatan wawancara lebih mudah mengarah kepada tujuan penelitian. Namun dalam melaksanakan wawancara terstruktur juga tidak

menutup kemungkinan untuk mendapatkan tambahan informasi diluar daftar pertanyaan yang ada.

- **Observasi**

Menurut Bungin (2013:143), metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati peneliti melalui penggunaan pancaindra. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung di lapangan. Observasi dilakukan untuk meninjau kondisi eksisting yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

- **Kuisisioner**

Berdasarkan Mardalis (2008: 66) dalam A. Ignasius Tri Sunanrna (2010) dalam, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Merupakan langkah pengumpulan data yang telah diolah oleh pihak/instansi terkait. Data yang didapat dapat berupa bentuk laporan, tabulasi hasil analisa dan lain sebagainya.

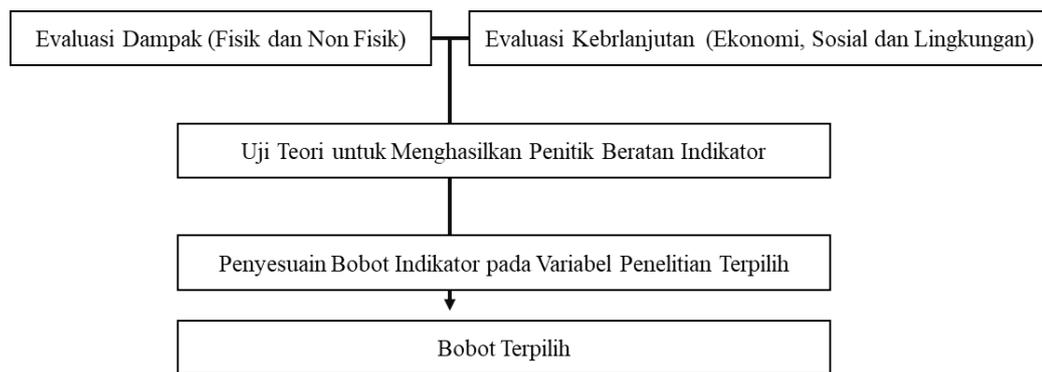
- **Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan kegiatan mencari informasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel, data perundangan serta media informasi lainnya. Informasi yang dihasilkan dari studi pustaka harus berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Studi pustaka dilakukan untuk menambah informasi serta memperkuat hasil penelitian. Studi pustaka dapat dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan kebutuhan peneliti.

1.10 Pembobotan Indikator Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program NUSP-2

Pembobotan merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk memberikan bobot untuk setiap faktor secara bersama-sama dan merupakan sebuah

teknik dalam pengambilan keputusan (Departemen Konservasi Sumber Daya dan Ekowisata Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2011). Pelaksanaan perhitungan bobot untuk setiap indikator penelitian dilakukan dengan cara mereplikasi metode pembobotan yang diuraikan oleh Egy Lystia Br. Ginting, (2018) dalam evaluasi keefektifan kinerja pembangunan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yakni dengan didasarkan pada teori-teori yang mendukung indikator yang digunakan yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik penelitian ini. Dibawah ini merupakan alur penentuan bobot penelitian ini.



Sumber: Hasil Analisa, 2021

GAMBAR 1.3
ALUR PENENTUAN BOBOT INDIKATOR PENELITIAN

1.10.1 Pembobotan Evaluasi Dampak NUSP-2

Pembobotan evaluasi dampak adalah dengan mempertimbangkan aspek fisik dan non fisik (sosial ekonomi) dari kegiatan NUSP-2 yang dilaksanakan di Kel. Kota Karang Raya. Kegiatan NUSP-2 merupakan rangkaian kegiatan yang terlingkup dalam program KOTAKU, acuan pengentasan permukiman kumuh adalah tetap selaras dengan tujuan dari program KOTAKU. Salah satu indikasi ketentuan program penyelenggaraan program peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan SE DJCK No. 40/SE/DC2016 adalah berorientasi pada *outcome*. Indikator *outcome* dari NUSP-2 berdasarkan SE DJCK No. 40/SE/DC2016 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 300 Kelurahan;

- b. Terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat di 20 Kota/Kabupaten;
- c. Terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil.

Perlu dicermati bahwa kelurahan Kota Karang Raya berdasarkan dokumen *Slum Improvement Action Plan* (SIAP) Kota Bandar Lampung masuk dalam wilayah dengan kategori rekomendasi penanganan adalah Peremajaan karena memiliki tingkat kekumuhan sedang dan berada pada kawasan legal, sehingga berdasarkan Panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) strategi yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Penyiapan lahan; 2) Peningkatan kapasitas bangunan hunian; 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman; 4) Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan *outcome* dari NUSP-2 dan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah yang legal dengan kelas kumuh kalsifikasi kumuh sedang yang cenderung berporos pada pelaksanaan fisik kegiatan. Maka pembobotan pada evaluasi dampak menitik beratkan pada komponen indikator fisik. Dibawah ini merupakan tabulasi nilai dari pembobotan evaluasi dampak implementasi NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya.

TABEL I.8
NILAI BOBOT EVALUASI DAMPAK

| No. | Kriteria/Indikator | Bobot (%) |
|-------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Fisik | 70 |
| 2 | Non Fisik (Sosial dan Ekonomi) | 30 |
| Total | | 100 |

Sumber: Hasil Analisa, 2021

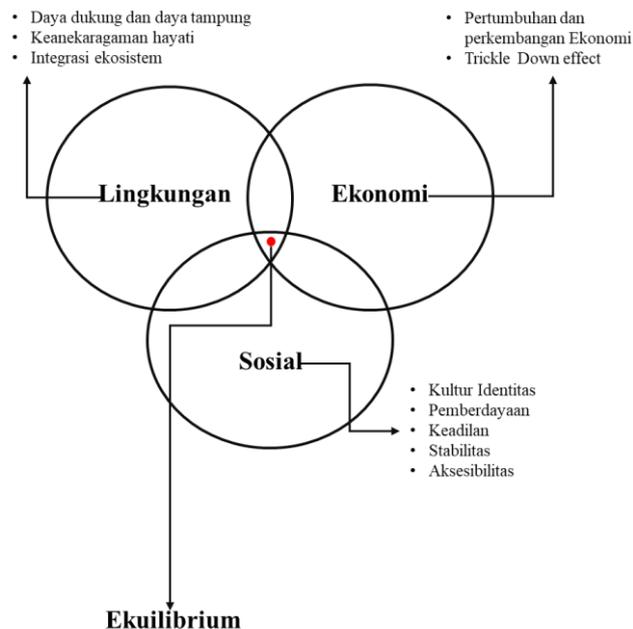
1.10.2 Pembobotan Evaluasi Keberlanjutan NUSP-2

Pembangunan berkelanjutan dalam aktivitasnya adalah sebuah tindakan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumberdaya alam hayati dan

non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dimana keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Brundtland dalam Budihardjo & Sujarto, 1999). Berdasarkan Iwan Priyoga (2010), Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*):

- a. Keberlanjutan Ekonomi;
- b. Keberlanjutan Sosial;
- c. Keberlanjutan Ekologi/Lingkungan.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana integrasi dari nilai lingkungan, nilai ekonomi, dan nilai sosial yang diharapkan menghasilkan kehidupan yang sejahtera bagi manusia. Dalam aplikasi pembangunan berkelanjutan, ketiga elemen tersebut harus berjalan simultan dan seimbang. Ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi akan menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunannya. Dibawah ini merupakan diagram keseimbangan keberlanjutan.



Sumber: Iwan Priyoga, 2010 (diolah)

GAMBAR 1.4
DIAGRAM KEBERLANJUTAN

Sehingga berdasarkan Iwan Priyoga (2010) dalam tulisannya yang berjudul desain berkelanjutan menyimpulkan bahwa konsep berkelanjutan merupakan konsep yang saling terkait antara sistem ekologis, sistem ekonomi dan sistem sosial, yang tidak lagi terpaku pada konsep awal yang lebih terfokus pada pemikiran kelestarian keseimbangan lingkungan semata-mata. Perlu adanya pemahaman terhadap penerapan konsep berkelanjutan ini secara tepat dan benar, terutama bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, baik dalam skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Uraian terkait keberlanjutan tersebut menjadi dasar bahwa pembobotan pada evaluasi keberlanjutan dengan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan akan dibagi rata sesuai dengan jumlah indikator yang ada. Di bawah ini merupakan tabulasi pembobotan untuk setiap indikator pada evaluasi keberlanjutan NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya

TABEL I.9
NILAI PEMBOBOTAN EVALUASI KEBERLANJUTAN

| No. | Kriteria/Indikator | Bobot (%) |
|-------|-------------------------|-----------|
| 1 | Aspek Ekonomi | 33,33 |
| 2 | Aspek Sosial/Masyarakat | 33,33 |
| 3 | Aspek Lingkungan | 33,33 |
| Total | | 99,99 |

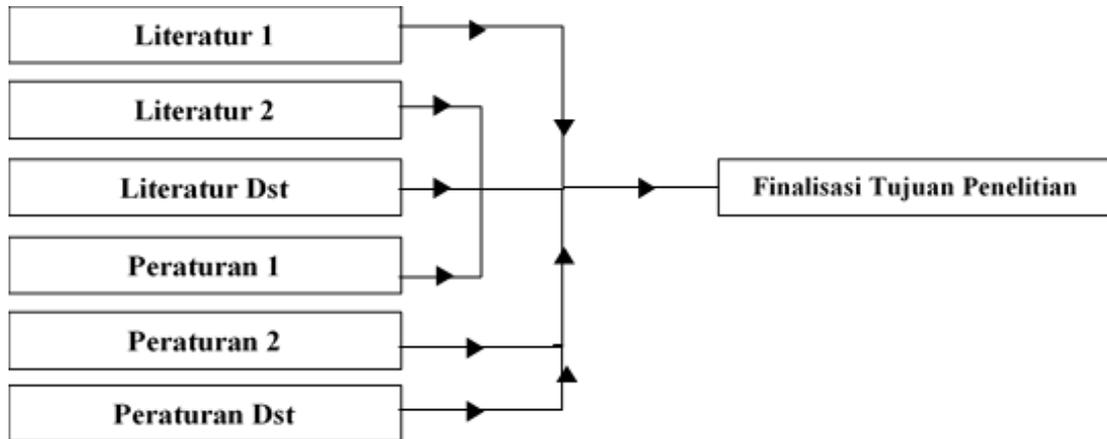
Sumber: Hasil Analisa, 2021

1.11 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1.11.1 Teknik Pengolahan dan Analisa Sasaran I

Sasaran I Mengidentifikasi tujuan fokus pelaksanaan evaluasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kelurahan Kota Karang Raya. Langkah untuk mencapai sasaran ini adalah dengan mengkaji berbagai literature terkait dengan peningkatan kawasan permukiman khususnya yang terkait dengan program NUSP-2 yang ada di Indonesia. Selain itu kajian mengenai peraturan yang terakit dengan peningkatan kualitas permukiman juga perlu dilaksanakan. Hal ini dilakukan guna menghasilkan

fokus penelitian (evaluasi) yang sesuai dengan karakteristik program dan wilayah studi.



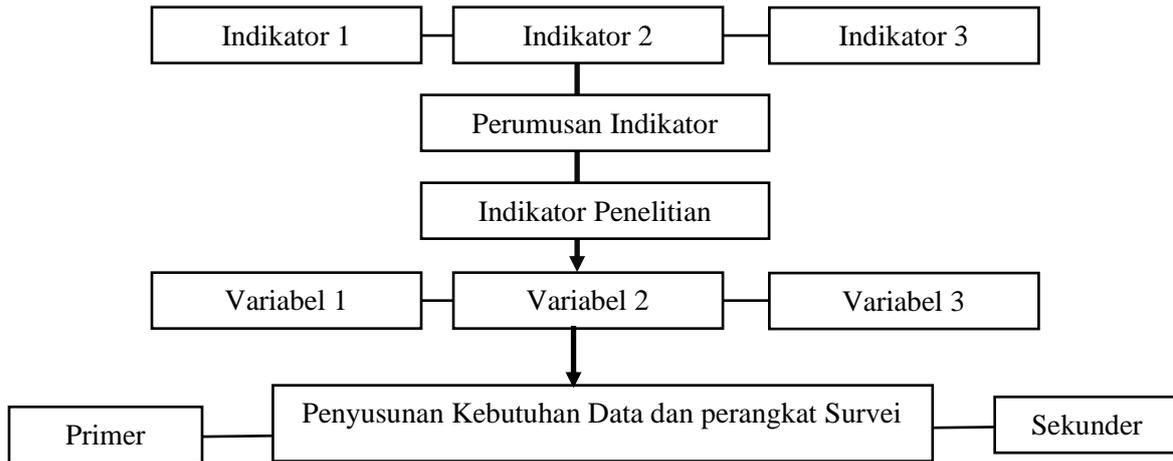
Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.5
ALUR OPERASIONAL Pengerjaan Sasaran I

1.11.2 Teknik Pengolahan dan Analisa Sasaran II

Sasaran II Mengidentifikasi parameter dan metode pelaksanaan Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* di Kelurahan Kota Karang Raya. Langkah yang dilakukan guna melaksanakan sasaran ini adalah dengan melakukan kajian mengenai tindakan evaluasi yang pernah dilaksanakan khususnya evaluasi yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman yang ada di Indonesia. Penentuan parameter penelitian dilaksanakan dengan melakukan sintesa terhadap beragam parameter yang dilakukan oleh penelitian terdahulu serta dengan tetap mempertimbangkan tujuan pelaksanaan program pada wilayah kajian. Pada tahap ini juga disepakati kebutuhan data serta teknik pengambilan data yang akan dilaksanakan.

Setelah dilakukan persiapan terkait parameter dan metodologi pelaksanaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian baik data sekunder maupun primer. Untuk memudahkan pelaksanaan analisa maka setelah data dikumpulkan maka dilakukan tindakan tabulasi data (pengelompokan) data sesuai dengan ciri khusus masing-masing.



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.6
ALUR OPERASIONAL Pengerjaan Sasaran II

1.11.3 Teknik Pengolahan dan Analisa Sasaran III

Sasaran III Merumuskan evaluasi implementasi program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Kota Karang Raya.* Pada tahap perumusan evaluasi diawali dengan kegiatan pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

Metode analisa yang digunakan dalam evaluasi dampak dari program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya adalah berbentuk *rating* yang terbagi atas poin 1, 0, 67 dan 0. Penentuan skala antara 0 – 1 disesuaikan dengan jenis pertanyaan yang didesain oleh peneliti. Tabel 1.10 merupakan penjelasan mengenai pemilihan jenis skala pada setiap indikator dampak. Metode *rating* menjadi titik kuantitatif dari penelitian ini, namun hasil perhitungan secara kuantitatif diperkuat dengan berbagai data baik yang didapat secara sekunder maupun primer. Hal ini menjadikan hasil penilaian *rating* pada penelitian ini belum dapat menjadi pertimbangan mutlak sehingga perlu diperkuat dengan data-data kualitatif untuk meningkatkan kebertanggung jawaban hasil yang diperoleh. Selain itu pemahaman terkait dengan *rating scale* digunakan untuk menghasilkan data-data statistik pada lembar observasi agar mempermudah peneliti untuk mendapatkan data. Data yang dihasilkan berupa data kuantitatif yang ditafsirkan dalam bentuk kualitatif sehingga relevan dalam pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini yakni *Mixing Methodology* (Prima Azhari, 2012). Pemahaman dan parameter setiap kondisi adalah tertera pada tabel 1.11.

Hal terpenting dari pelaksanaan penelitian dengan metode penilaian *rating scale* adalah bagaimana ketelitian peneliti dalam menafsirkan makna dan jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini terjadi karena dalam penilaian *rating scale* terhadap 2 responden dengan jawaban skor yang sama belum tentu memiliki arti yang mutlak sama, melainkan terdapat perbedaan-perbedaan persepsi sehingga peneliti perlu dengan jeli melihat kondisi perbedaan tersebut.

**TABEL I.10
DASAR PEMILIHAN SKOR EVALUASI DAMPAK**

| No. | Indikator | Variabel | Sub Variabel | Skor | Keterangan | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | Non Fisik | Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau koperasi. | Tidak terjadi peningkatan berbagai usaha yang dikelola masyarakat dalam skala mikro. | 0 | Menggambarkan kelas perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang terbagi atas 3 (tiga) kelas | | | | | | |
| | | | Terjadi peningkatan kegiatan ekonomi mikro yang tidak signifikan. | 0,67 | | | | | | | |
| | | | Tidak Terjadi peningkatan/munculnya kegiatan ekonomi mikro baru masyarakat karna NUSP-2. | 1 | | | | | | | |
| | | Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat | Tidak terjadi perubahan kondisi sosial. | 0 | | | | | | | |
| | | | Terjadi perubahan kondisi sosial namun dengan frekuensi dan tingkat partisipasi yang rendah. | 0,67 | | | | | | | |
| | | | Terjadi perubahan kondisi sosial seperti munculnya kegiatan gotong royong, rembuk warga dan siskamling. | 1 | | | | | | | |
| 2 | Fisik | Kondisi drainase | <table border="1"> <tr> <td>Ketidakmampuan mengalirkan limpasan</td> <td>0 = Tidak mampu 1 = Mampu</td> </tr> <tr> <td>Ketidakterediaan drainase</td> <td>0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase 0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase 1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase</td> </tr> <tr> <td>Tidak terpeliharanya drainase</td> <td>0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau.</td> </tr> </table> | Ketidakmampuan mengalirkan limpasan | 0 = Tidak mampu 1 = Mampu | Ketidakterediaan drainase | 0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase 0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase 1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase | Tidak terpeliharanya drainase | 0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau. | 0 | Kelas terbagi 3 sesuai dengan arahan Permen PU No. 2 Tahun 2016 |
| | | | Ketidakmampuan mengalirkan limpasan | 0 = Tidak mampu 1 = Mampu | | | | | | | |
| | | | Ketidakterediaan drainase | 0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase 0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase 1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase | | | | | | | |
| | | | Tidak terpeliharanya drainase | 0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau 1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau. | | | | | | | |
| | 0,67 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator | Variabel | Sub Variabel | | Skor | Keterangan |
|--|-----------|--------------------------|---|--|------------------------|---|
| | | | Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan Kualitas konstruksi drainase | 0,00 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya.. 0,67 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya 1,00 = 25%-50% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya 0,00 = 76%-100% kualitas drainase buruk 0,67 = 76%-100% kualitas drainase buruk 1,00 = 25%-50% kualitas drainase buruk | 1 | |
| <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | | | | |
| | | Kondisi jalan lingkungan | Cakupan jaringan pelayanan Kualitas permukaan jalan | 0,00 = 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 0,67 = 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1,00 = 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 0,00 = 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 0,67 = 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1,00 = 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 0 0,67 1 | Kelas terbagi 3 sesuai dengan arahan Permen PU No. 2 Tahun 2016 |
| <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | | | | |

| No. | Indikator | Variabel | Sub Variabel | | Skor | Keterangan | | |
|--|-----------|---------------------|--------------|--|--|------------|---|--|
| | | Kondisi persampahan | | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis | 0,00 = 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | 0 | Kelas terbagi 3 sesuai dengan arahan Permen PU No. 2 Tahun 2016 | |
| | | | | Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis | 0,00 = 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis | 0,67 | | |
| | | | | Tidak Terpelihara Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah | 0,00 = 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 0,67 = 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 1,00 = 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara | 1 | | |
| <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | | | | | | |

| No. | Indikator | Variabel | Sub Variabel | Skor | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------------|--|------|---|
| | | Kondisi jaringan air limbah | <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis</p> <p>0,00 = 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis</p> | 0 | Kelas terbagi 3 sesuai dengan arahan Permen PU No. 2 Tahun 2016 |
| | | | <p>Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis</p> <p>0,00 = 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis</p> | 0,67 | |
| | | | | 1 | |
| | | Kondisi Penyediaan Air Minum | <p>Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum</p> <p>0,00 = 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 0,67 = 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</p> | 0 | Kelas terbagi 3 sesuai dengan arahan Permen PU No. 2 Tahun 2016 |

Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)

| No. | Indikator | Variabel | Sub Variabel | | Skor | Keterangan |
|-----|-----------|----------|--|---|------|------------|
| | | | | 1,00 = populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 0,67 | |
| | | | Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 0,00 = 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 0,67 = 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 1,00 = 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 | |

Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)

Sumber: Hasil Analisa, 2020

TABEL I.11
PEMAHAMAN VARIABEL EVALUASI DAMPAK

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor |
|-----|--------------------|---|---|------------|-------|------|
| 1 | Non Fisik | Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau koperasi. | Tidak terjadi peningkatan berbagai usaha yang dikelola masyarakat dalam skala mikro | | 15% | 0 |
| | | | Terjadi peningkatan kegiatan ekonomi mikro yang tidak signifikan. | | | 0,67 |

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|-----|---|
| | | | Tidak Terjadi peningkatan/munculnya kegiatan ekonomi mikro baru masyarakat. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat | Tidak terjadi perubahan kondisi sosial. | | 15% | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tidak Terjadi peningkatan/munculnya kegiatan ekonomi mikro baru masyarakat karna NUSP-2. | | | 0,67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terjadi perubahan kondisi sosial seperti munculnya kegiatan gotong royong, rembuk warga dan siskamling. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fisik | Kondisi drainase | <table border="1"> <tr> <td>Ketidakkemampuan mengalirkan limpasan</td> <td>0 = Tidak mampu 1 = Mampu</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Ketidakterediaan drainase</td> <td>0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase</td> </tr> <tr> <td>1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tidak terpeliharanya drainase</td> <td>0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau</td> </tr> <tr> <td>1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan</td> <td>0,00 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya..</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya</td> </tr> </table> | Ketidakkemampuan mengalirkan limpasan | 0 = Tidak mampu 1 = Mampu | Ketidakterediaan drainase | 0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase | 0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase | 1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase | Tidak terpeliharanya drainase | 0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau | 0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau | 1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau. | Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan | 0,00 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya.. | 0,67 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya | <p>Nilai dari setiap sub-variabel dijumlahkan dan dirata-rata untuk menghasilkan skor drainase</p> | 14% | 0 |
| | | | Ketidakkemampuan mengalirkan limpasan | 0 = Tidak mampu 1 = Mampu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ketidakterediaan drainase | 0,00 = 25%-50% wilayah terlayani drainase | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,67 = 51%-75% wilayah terlayani drainase | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 = 76%-100% wilayah terlayani drainase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tidak terpeliharanya drainase | 0,00 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 = 76%-100% drainase lingkungan kotor dan berbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,00 = 25%-50% drainase lingkungan kotor dan berbau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan | 0,00 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 = 76%-100% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase diatasnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|--|---|------|---|
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1,00 = 25%-50% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kualitas konstruksi drainase</td> <td>0,00 = 76%-100% kualitas drainase buruk</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 76%-100% kualitas drainase buruk</td> </tr> <tr> <td>1,00 = 25%-50% kualitas drainase buruk</td> </tr> </table> <p>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</p> | | 1,00 = 25%-50% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya | Kualitas konstruksi drainase | 0,00 = 76%-100% kualitas drainase buruk | 0,67 = 76%-100% kualitas drainase buruk | 1,00 = 25%-50% kualitas drainase buruk | | | | | | | | |
| | 1,00 = 25%-50% tidak memiliki keterhubungan dengan drainase di atasnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kualitas konstruksi drainase | 0,00 = 76%-100% kualitas drainase buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 = 76%-100% kualitas drainase buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,00 = 25%-50% kualitas drainase buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kondisi jalan lingkungan | <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Cakupan jaringan pelayanan</td> <td>0,00 = 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</td> </tr> <tr> <td>1,00 = 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kualitas permukaan jalan</td> <td>0,00 = 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</td> </tr> <tr> <td>0,67 = 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</td> </tr> <tr> <td>1,00 = 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</td> </tr> </table> <p>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</p> | Cakupan jaringan pelayanan | 0,00 = 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 0,67 = 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1,00 = 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | Kualitas permukaan jalan | 0,00 = 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 0,67 = 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1,00 = 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | <p>Nilai dari setiap sub-variabel dijumlahkan dan dirata-rata untuk menghasilkan skor jalan lingkungan</p> | 14% | <table border="1"> <tr> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table> | 0 | 0,67 | 1 |
| Cakupan jaringan pelayanan | 0,00 = 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 = 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,00 = 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kualitas permukaan jalan | 0,00 = 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,67 = 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,00 = 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor |
|--|---|---------------------|--|--|-------|------|
| | | Kondisi persampahan | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis 0,00 = 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis | Nilai dari setiap sub-variabel dijumlahkan dan dirata-rata untuk menghasilkan skor pengelolaan persampahan | 14% | 0 |
| | Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis 0,00 = 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis | | 0,67 | | | |
| | Tidak Terpelihara Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah 0,00 = 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 0,67 = 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 1,00 = 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara | | 1 | | | |
| <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | | | | |

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor |
|--|---|------------------------------|--|--|-------|------|
| | | Kondisi jaringan air limbah | Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis 0,00 = 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis | Nilai dari setiap sub-variabel dijumlahkan dan dirata-rata untuk menghasilkan skor jaringan air limbah | 14% | 0 |
| | Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis 0,00 = 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 0,67 = 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 1,00 = 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis | | 1 | | | |
| <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | | | | |
| | | Kondisi Penyediaan Air Minum | Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum 0,00 = 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 0,67 = 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1,00 = populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | Nilai dari setiap sub-variabel dijumlahkan dan dirata-rata untuk skor kondisi | 14% | 0 |

| No. | Kriteria/Indikator | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Keterangan | Bobot | Skor |
|-----|--------------------|----------|--|----------------------|-------|------|
| | | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>0,00 = 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 0,67 = 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 1,00 = 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</p> </div> </div> | penyediaan air minum | | 0,67 |
| | | | <i>Sumber: Permen PU No. 2 Tahun 2016 (diolah)</i> | | | 1 |

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Penilaian keseluruhan evaluasi dampak dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang Raya dilakukan dengan mengalikan setiap nilai skoring yang dihasilkan dengan bobot. Berdasarkan Egy Lystia Br Ginting, (2018), Identifikasi nilai bobot setiap variabel dilakukan identifikasi urgensi setiap variabel yang didasarkan pada hasil teori yang perundangan yang berlaku.

Bobot x Skor

Hasil dari perkalian bobot dan skor setiap variabel kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasil keseluruhan penilaian dan diinterpretasikan dalam bentuk kelas berdasarkan rentang yang telah ditentukan. Berdasarkan Egy Lystia Br Ginting, (2018) berikut merupakan rumus dalam mencari rentang kelas.

$$\text{Nilai Prestasi Kerja (NPK)} = \text{Jumlah Skor (Setiap Variabel)}$$

Rentang kelas ditentukan dengan menggunakan formulasi sturgess yakni:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan

k = Jumlah Kelas

n = Jumlah Indikator yang digunakan

Sehingga mendapat rentang interval penilaian bentuk evaluasi dampak adalah.

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$k = 1 + 3,3 \log 7$$

$K = 3,78$ atau dibulatkan menjadi 4 kelas

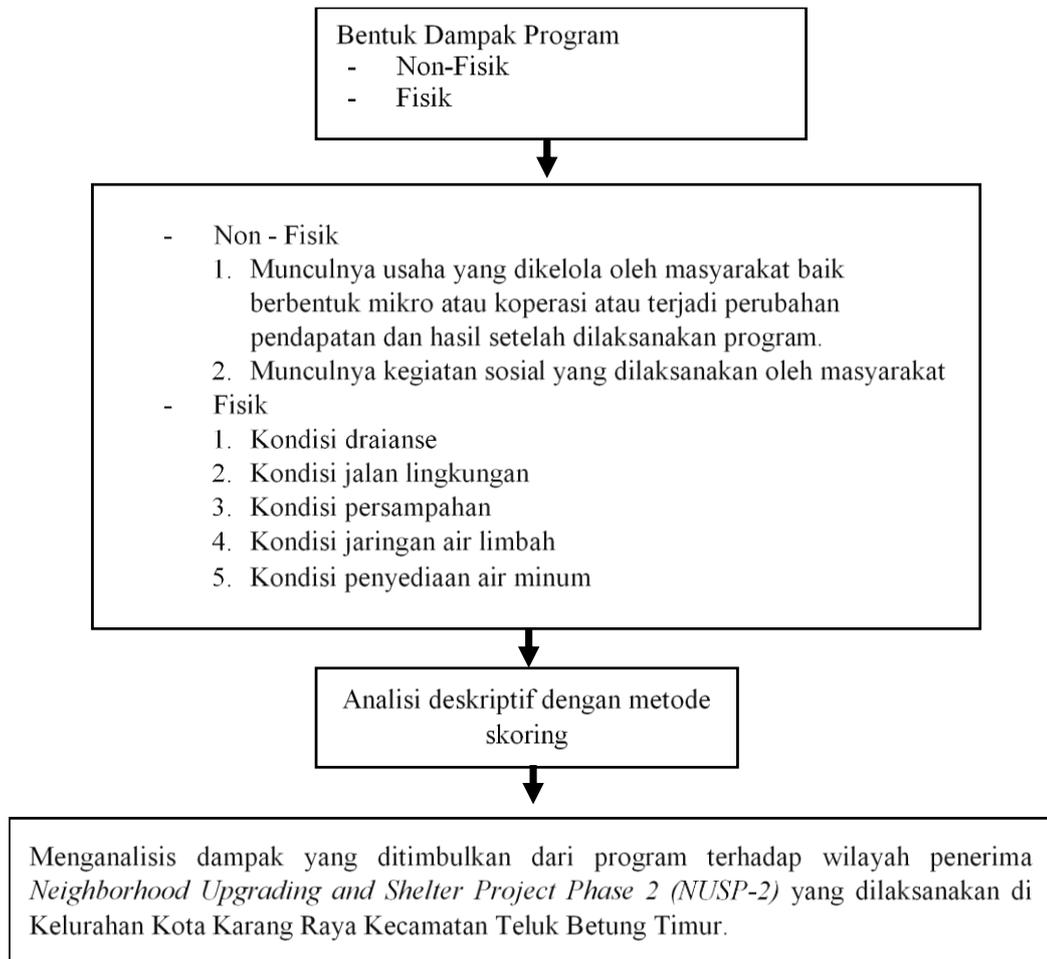
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus sturgess maka didapatkan rentang interval 4 kelas pada penyajian tingkat keberhasilan dengan sudut pandang kriteria dampak yang ditimbulkan terhadap penerima program baik secara fisik dan non-fisik. Rentang kelas keberhasilan evaluasi dampak program disajikan dalam tabel dibawah ini.

TABEL I.12
RENTANG PENILAIAN PENILAIAN EVALUASI DAMPAK

| No. | Rentang Penilaian | Penilaian | Keterangan |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | $0 \leq \text{NPK} \leq 0,25$ | Tidak Berdampak | 0% dampak |

| No. | Rentang Penilaian | Penilaian | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | $0,26 \leq \text{NPK} \leq 0,50$ | Kurang Berdampak | $\leq 25\%$ dampak |
| 3 | $0,51 \leq \text{NPK} \leq 0,75$ | Cukup Berdampak | $\leq 50\%$ dampak |
| 4 | $0,76 \leq \text{NPK} \leq 1$ | Berdampak Optimal | $\leq 75\%$ dampak |

Sumber: Hasil Analisa, 2020



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.7 ALUR OPERASIONAL KRITERIA DAMPAK

Penilaian keberlanjutan dari program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya dilakukan dengan menggunakan skala rating/*rating scale*. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan metode yang dilakukan yakni dengan *mixing methodology*. Skala rating hadir sebagai bentuk kuantitatif dalam penelitian ini sedangkan, sisi kualitatif hadir dengan tetap mempertimbangkan data-data pendukung diluar hasil

rating yang telah dilaksanakan. Hal ini juga sejalan berdasarkan pendapat Prima Azhari (2012), dinyatakan bahwa *rating scale* hadir dengan data yang dihasilkan berbentuk kuantitatif dan ditafsirkan dalam bentuk kualitatif.

Metode analisa yang digunakan dalam keberlanjutan dari program NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya adalah berbentuk *rating* yang terbagi atas poin 1, 0, 67 dan 0. Penentuan skala antara 0 – 1 disesuaikan dengan jenis pertanyaan yang didesain oleh peneliti. Tabel 1.13 merupakan penjelasan mengenai pemilihan jenis skala pada setiap indikator keberlanjutan. Pemahaman dan parameter setiap kondisi adalah tertera pada tabel 1.14.

Hal terpenting dari pelaksanaan penelitian dengan metode penilaian *rating scale* adalah bagaimana ketelitian peneliti dalam menafsirkan makna dan jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini terjadi karena dalam penilaian *rating scale* terhadap 2 (dua) responden dengan jawaban skor yang sama belum tentu memiliki arti yang mutlak sama, melainkan terdapat perbedaan-perbedaan persepsi sehingga peneliti perlu dengan jeli melihat kondisi perbedaan tersebut.

TABEL I.13
DASAR PENENTUAN SKOR EVALUASI KEBERLANJUTAN

| No. | Kriteria | Variabel | Sub Variabel | Skor | Keterangan |
|-----|---------------------------|--|---|------|---|
| 1 | Dimensi Ekonomi | Peningkatan Harga Lahan | Tidak terjadi peningkatan harga lahan | 0 | Menggambarkan keberlanjutan dari sisi dimensi ekonomi yang terbagi atas 3 (tiga) kelas” |
| | | | Peningkatan nilai lahan dan bangunan secara tidak signifikan | 0,67 | |
| | | | Terjadi peningkatan harga lahan secara signifikan | 1 | |
| | | Pengeluaran masyarakat pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | Seluruh warga mengalami penambahan pengeluaran pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | 0 | |
| | | | Terdapat beberapa warga yang mengeluarkan biaya diluar O&P namun terjadi karena hasil program | 0,67 | |
| | | | Tidak ada warga yang mengalami penambahan pengeluaran pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | 1 | |
| 2 | Dimensi Masyarakat/Sosial | Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program selesai dilaksanakan | Tidak ada program swadaya setelah pelaksanaan program | 0 | Menggambarkan keberlanjutan dari sisi sosial yang terbagi atas 3 (tiga) kelas” |
| | | | Masyarakat masih melakukan swadaya namun dengan intensitas rendah/tidak menentu | 0,67 | |
| | | | Masyarakat melaksanakan swadaya pengelolaan hasil program dengan baik | 1 | |
| | | Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan | Biaya operasional hasil program ditanggung kelurahan seutuhnya | 0 | |
| | | | Terjadi pembagian pengelolaan antara pihak kelurahan dan masyarakat | 0,67 | |

| No. | Kriteria | Variabel | Sub Variabel | Skor | Keterangan |
|-----|--------------------|--|--|------|--|
| | | | Masyarakat dengan sadar melakukan iuran pembiayaan untuk pemeliharaan hasil program | 1 | |
| 3 | Dimensi Lingkungan | Penerapan prinsip 3R | Tidak terjadi penerapan prinsip 3R | 0 | Menggambarkan keberlanjutan dari sisi lingkungan yang terbagi atas 3 (tiga) kelas” |
| | | | Penerapan 3R masih rendah/belum signifikan | 0,67 | |
| | | | Masyarakat secara sadar melakukan penerapan 3R | 1 | |
| | | Masyarakat memiliki upaya untuk meminimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah | Belum terdapat upaya masyarakat dalam mengurangi penggunaan energi dan limbah | 0 | |
| | | | Terdapat upaya masyarakat untuk mengurangi limbah namun masih dalam intensitas yang rendah | 0,67 | |
| | | | Terdapat upaya masyarakat dalam mengurangi penggunaan energi dan limbah yang dilaksanakan secara sistematis. | 1 | |

Sumber: Hasil Analisa, 2020

TABEL I.14
PEMAHAMAN VARIABEL EVALUASI KEBERLANJUTAN

| No. | Kriteria | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Bobot | Skor |
|-----|-----------------|-------------------------|--|--------|------|
| 1 | Dimensi Ekonomi | Peningkatan Harga Lahan | Terjadi peningkatan harga lahan | 16,66% | 0 |
| | | | Peningkatan nilai lahan dan bangunan secara tidak signifikan | | 0,67 |
| | | | Tidak terjadi peningkatan harga lahan | | 1 |

| No. | Kriteria | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Bobot | Skor |
|-----|---------------------------|--|---|--------|------|
| | | Pengeluaran masyarakat pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | Seluruh warga mengalami penambahan pengeluaran pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | 16,66% | 0 |
| | | | Terdapat beberapa warga yang mengeluarkan biaya diluar O&P namun terjadi karena hasil program | | 0,67 |
| | | | Tidak ada warga yang mengalami penambahan pengeluaran pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | | 1 |
| 2 | Dimensi Masyarakat/Sosial | Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program selesai dilaksanakan | Tidak ada program swadaya setelah pelaksanaan program | 16,66% | 0 |
| | | | | | 0,67 |
| | | | Masyarakat melaksanakan swadaya pengelolaan hasil program dengan baik | | 1 |
| | | Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan | Biaya operasional hasil program ditanggung kelurahan seutuhnya | 16,66% | 0 |
| | | | Terjadi pembagian pengelolaan antara pihak kelurahan dan masyarakat | | 0,67 |
| | | | Masyarakat dengan sadar melakukan iuran pembiayaan untuk pemeliharaan hasil program | | 1 |
| 3 | Dimensi Lingkungan | Penerapan prinsip 3R | Tidak terjadi penerapan prinsip 3R | 16,66% | 0 |

| No. | Kriteria | Variabel | Sub Variabel/Parameter | Bobot | Skor |
|-----|----------|--|--|--------|------|
| | | | Penerapan 3R masih rendah/belum signifikan | | 0,67 |
| | | | Masyarakat secara sadar melakukan penerapan 3R | | 1 |
| | | Masyarakat memiliki upaya untuk meminimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah | Belum terdapat upaya masyarakat dalam mengurangi penggunaan energi dan limbah | 16,66% | 0 |
| | | | Terdapat upaya masyarakat untuk mengurangi limbah namun masih dalam intensitas yang rendah | | 0,67 |
| | | | Terdapat upaya masyarakat dalam mengurangi penggunaan energi dan limbah yang dilaksanakan secara sistematis. | | 1 |

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Perhitungan nilai keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah ini:

Bobot x skor

Penilaian keseluruhan evaluasi keberlanjutan dari program NUSP-2 yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang Raya dilakukan dengan melakukan pembobotan untuk setiap variabel dengan menggunakan formula.

$$\text{Nilai Prestasi Kerja (NPK)} = \text{Jumlah Skor (Setiap Variabel)}$$

Rentang kelas ditentukan dengan menggunakan formulasi sturgess yakni:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan

k = Jumlah Kelas

n = Jumlah Indikator yang digunakan

Sehingga dapat rentang interval penilaian bentuk evaluasi dampak adalah.

$$k = 1 + 3,3 \log 7$$

$$k = 3,98$$

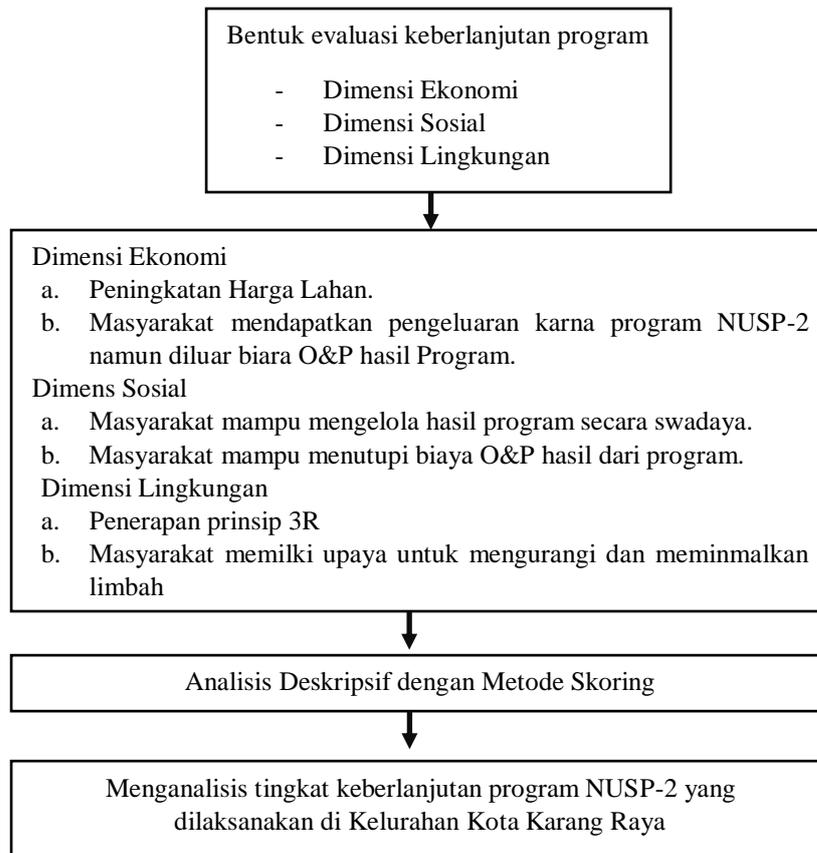
atau dibulatkan menjadi 4 kelas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus sturgess maka didapatkan rentang interval 4 (empat) kelas pada penyajian tingkat keberhasilan dengan sudut pandang kriteria keberlanjutan yang ditimbulkan terhadap penerima program rentang kelas keberhasilan evaluasi keberlanjutan program disajikan dalam tabel dibawah ini.

TABEL I.15
RENTANG PENILAIAN EVALUASI KEBERLANJUTAN

| No. | Rentang Penilaian | Penilaian | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | $0 \leq \text{NPK} \leq 0,25$ | Tidak <i>Suistana</i> ble | 0% Keberlanjutan |
| 2 | $0,26 < \text{NPK} \leq 0,50$ | Kurang <i>Suistana</i> ble | $\leq 25\%$ Keberlanjutan |
| 3 | $0,51 < \text{NPK} \leq 0,75$ | Cukup <i>Suistana</i> ble | $\leq 50\%$ Keberlanjutan |
| 4 | $0,76 < \text{NPK} \leq 1$ | <i>Suistana</i> ble | $\leq 75\%$ Keberlanjutan |

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.8 ALUR OPERASIONAL KRITERIA KEBERLANJUTAN

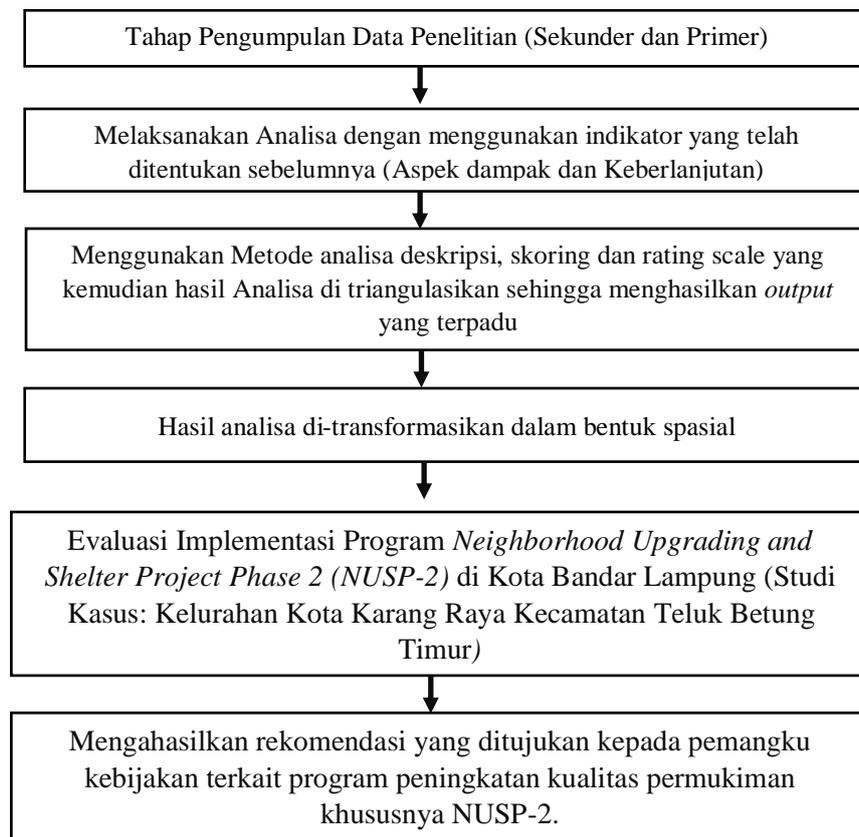
Setelah perhitungan nilai skor dampak dan keberlanjutan serta juga telah dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan, maka akan terdapat 2 (dua) opsi hasil penilaian yakni:

- a. Penilaian akan terbagi 2 (dua), yakni penilaian di setiap RT dan penilaian secara kumulatif dengan mencari rata-rata nilai dari keseluruhan RT. Hal ini terjadi apabila variasi tidak terlalu beragam, sehingga data cenderung memiliki seragam atau sejenis sehingga cukup representatif (Nuryadi dll, 2017).
- b. Penilaian hanya akan dilakukan dengan melakukan penilaian penilaian Per-RT. Kondisi ini dilakukan jika dirasa variasi data yang dihasilkan cukup tinggi. Berdasarkan Nuryadi, dkk (2017), disebutkan bahwa semakin tinggi variasi nilai maka rata-rata distribusi akan semakin tidak representatif.

Hasil dari pencapaian keberhasilan berdasarkan Dampak dan Keberlanjutan kemudian ditriangulasikan dengan data-data lain yang didapatkan

sehingga menghasilkan hasil evaluasi berdasarkan aspek keberlanjutan dan aspek dampak yang terpadu. Selain itu hasil dari analisa yang dilakukan ditransformasikan dalam bentuk spasial, hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini.

Hasil analisa yang telah dilaksanakan dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Rekomendasi penelitian diarahkan kepada setiap *stakeholder* yang berpengaruh dalam kegiatan peningkatan kualitas permukiman khususnya yang berkaitan dengan program NUSP-2.



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1.9 ALUR OPERASIONAL SASARAN 3

TABEL I.16
PENETAPAN VARIABEL PENELITIAN

| No. | Bentuk Evaluasi | Analisis | Kriteria/Indikator | Variabel | Definisi Operasional |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Sasaran 3 Merumuskan evaluasi implementasi program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)</i> di Kelurahan Kota Karang Raya. | | | | | |
| 1 | Dampak | Deskriptif dengan metode skoring | Non-Fisik | Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau koperasi atau terjadi perubahan pendapatan dan hasil setelah dilaksanakan program. | Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan |
| 2 | | | | Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat | Pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman dapat berimplikasi pada munculnya beragam kegiatan sosial masyarakat seperti siskamling, arisan warga dan kegiatan gotong royong |
| 3 | | | Fisik | Kondisi drainase | Kondisi infrastruktur fisik yang ditetapkan sesuai dengan Peremen PUPR No. 02/PRT/M/2016 dan menjadi standar acuan dasar permukiman kumuh. Penetapan 5 jenis infrastruktur disesuaikan dengan jenis pelaksanaan program yang dilakukan di daerah kajian. |
| 4 | | | | Kondisi Penyediaan air minum | |
| 5 | | | | Kondisi jalan lingkungan | |
| 6 | | | | Kondisi persampahan | |
| 7 | | | | Kondisi jaringan air limbah | |

| No. | Bentuk Evaluasi | Analisis | Kriteria/Indikator | Variabel | Definisi Operasional |
|-----|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|
| 8 | Keberlanjutan | Deskriptif dengan metode skoring | Dimensi Ekonomi | Peningkatan nilai tambah lingkungan | Menjadikan lingkungan berkualitas sehingga menghasilkan peningkatan terhadap harga lahan. |
| 9 | | | | Pengeluaran masyarakat pasca program diluar biaya operasional dan pemeliharaan | Pengeluaran masyarakat pada kegiatan non-program NUSP-2 yang disebabkan oleh pelaksanaan program. |
| 10 | | | Dimensi Masyarakat/Sosial | Seluruh kegiatan program menghasilkan dampak negatif | Seluruh kegiatan dari program yang dilaksanakan menghasilkan dampak sampingan sehingga memerlukan biaya diluar biaya operasional dan pemeliharaan. |
| 11 | | | | Beberapa kegiatan program menghasilkan dampak yang membuat masyarakat mengeluarkan biaya tambahan | Terdapat kegiatan dari program yang dilaksanakan menghasilkan dampak sampingan sehingga memerlukan biaya diluar biaya operasional dan pemeliharaan. |
| 12 | | | | Masyarakat tidak menerima dampak negatif program yang memerlukan biaya | Tidak ada kegiatan dari program yang dilaksanakan menghasilkan dampak sampingan sehingga memerlukan biaya diluar biaya operasional dan pemeliharaan. |
| 13 | | | Dimensi Lingkungan | Penerapan prinsip 3R | Implementasi 3R dalam tahapan pengembangan dan pembangunan lingkungan perumahan |

| No. | Bentuk Evaluasi | Analisis | Kriteria/Indikator | Variabel | Definisi Operasional |
|-----|-----------------|----------|--------------------|--|--|
| 14 | | | | Masyarakat memiliki upaya untuk meminimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah | Pelaksanaan program tetap dalam koridor menghindari pembangunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tetap pada jalur <i>low cost</i> energi. |

Sumber: Hasil Analisa, 2020

TABEL I.17
TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN

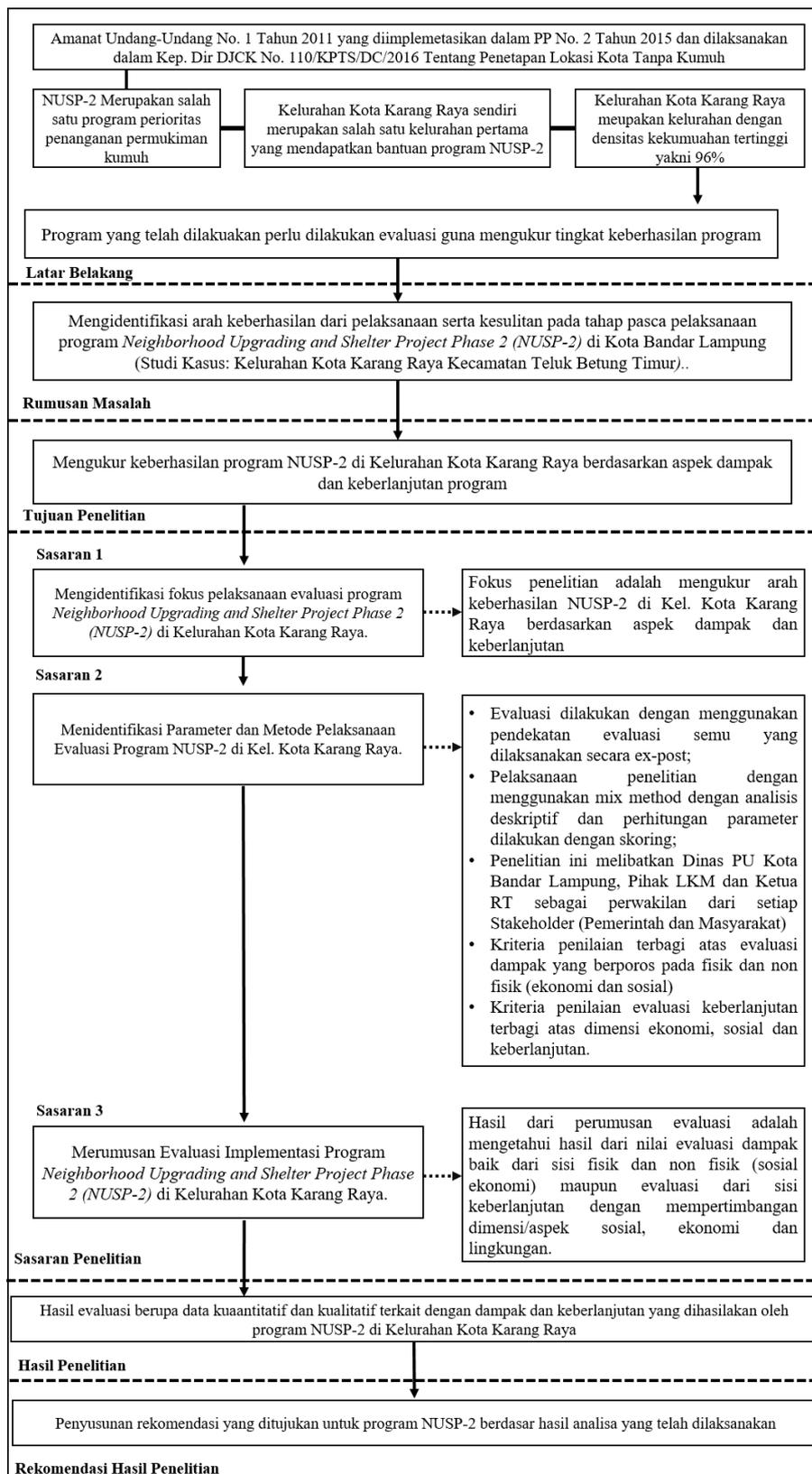
| No. | Sasaran | Kegiatan/Tahapan Evaluasi | Metode | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Variabel | Output |
|-----|---|----------------------------|-----------------|---|----------|--------------------------------------|
| 1 | Mengidentifikasi fokus pelaksanaan evaluasi program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)</i> di Kelurahan Kota Karang Raya. | Menentukan tujuan evaluasi | Studi Literatur | Identifikasi Kebijakan terkait Peningkatan kualitas permukiman | | Penentuan arahan dan tujuan evaluasi |
| | | | | Identifikasi Kebijakan terkait NUSP-2 | | |
| | | | | Kajian Literatur terkait dengan peningkatan kualitas permukiman | | |
| 2 | Mengidentifikasi Parameter dan metode | - Penyusunan Desain | Studi Literatur | Penyusunan indikator serta | | Penentuan acuan |

| No. | Sasaran | Kegiatan/Tahapan Evaluasi | Metode | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Variabel | Output |
|-----|--|--|---|--|----------|--|
| | Pelaksanaan Evaluasi Program NUSP-2 di Kel. Kota Karang Raya | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi, diskusi rencana evaluasi - Menentukan pelaku evaluasi | | variabel pengerjaan penelitian | | perhitungan nilai evaluasi |
| | | | Studi Literatur | Penyusunan metode analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian | | Penentuan tata cara perhitungan dan analisa penelitian |
| | | | Studi Literatur | Penyusunan kebutuhan data pengerjaan | | Penentuan data yang digunakan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan |
| | | | - | Penyusunan alur dan pentahapan kegiatan | | Sebagai acuan tahapan pelaksanaan pengerjaan |
| 3 | Merumusan Evaluasi Implementasi | Melakukan evaluasi | Survei Lapangan (Observasi, angket dan wawancara) | Pengumpulan data primer dan sekunder | | Pengumpulan data guna apengerjaan |

| No. | Sasaran | Kegiatan/Tahapan Evaluasi | Metode | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Variabel | Output | |
|-----|---|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | Program NUSP-2 di Kel. Kota Karang Raya | | | | Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau koperasi atau terjadi perubahan pendapatan dan hasil setelah dilaksanakan program. | pada tahap selanjutnya | |
| | | | - | Tabulasi data primer dan sekunder yang didapatkan | Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat | Mereduksi dan memilah data sesuai dengan kebutuhan penelitian | |
| | | | Analisis Deskriptif dengan Metode Skoring | perhitungan nilai setiap variabel pada setiap indikator sesuai dengan desain penelitian | Kondisi drainase | Hasil analisa yang bersifat terpadu | |
| | | | Triangulasi data | triangulasi antara data primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian | Kondisi Penyediaan air minum | | |
| | | | | | Kondisi jalan lingkungan | | |
| | | | | | | Kondisi persampahan | Melakukan interpretasi data dalam bentuk peta guna mempermudah pembaca dalam memahami data dalam lingkup |
| | | | | | | Kondisi jaringan air limbah | |
| | | | | Peningkatan nilai tambah lingkungan (harga lahan) | | | |
| | | | Pertampalan/ <i>overlay</i> | Interpretasi hasil perhitungan kedalam bentuk spasial | Masyarakat dapat tetap menerima manfaat jangka panjang setelah program selesai dilaksanakan | | |
| | | | | | Masyarakat mampu mengoperasikan dan | | |

| No. | Sasaran | Kegiatan/Tahapan Evaluasi | Metode | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Variabel | Output |
|-----|---------|---|--------|---|--|--|
| | | | | | memelihara alat pada program | wilayah kajian penelitian |
| | | | - | Perumusan kesimpulan yang bersumber atas hasil analisa yang telah dilaksanakan | Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program selesai dilaksanakan | Uraian singkat terkait hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan |
| | | Mendesiminasiikan hasil Evaluasi dan Menggunakan Hasil Evaluasi Menggunakan hasil Evaluasi dan Menggunakan Hasil Evaluasi | - | Perumusan rekomendasi bagi setiap stakeholder yang terkait dengan NUSP-2 dan/atau yang terkait dengan tindakan peningkatan kualitas permukiman. | Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan Penerapan prinsip 3R Masyarakat memiliki upaya untuk meminimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah | Rekomendasi Penelitian |

Sumber: Hasil Analisa, 2020



Sumber: Hasil Analisa, 2020

GAMBAR 1.10
ALUR OPERASIONAL PENELITIAN

1.12 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka terkait dengan evaluasi implementasi, gambaran umum wilayah Kel. Kota Karang Raya kemudian analisa terkait dengan perumusan evaluasi implementasi NUSP-2 hingga kesimpulan dan rekomendasi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian/masalah, rumusan masalah yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian, tujuan kemudian sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup baik wilayah, substansi maupun waktu, kerangka pikir dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA EVALUASI IMPLEMENTASI NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut menjadi dasar pemahaman dalam melakukan penelitian.

BAB III GAMBARAN WILAYAH KELURAHAN KOTA KARANG RAYA

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi wilayah atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu kawasan pusat perkotaan di Bandar Lampung dengan studi kasus koridor yang telah ditetapkan. Bab ini terdiri dari peta wilayah penelitian, serta kondisi-kondisi umum wilayah serta tinjauan kebijakan wilayah.

BAB IV ANALISA PERUMUSAN EVALUASI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM NUSP-2 DI KEL. KOTA KARANG RAYA

Pada bab ini uraikan mengenai pelaksanaan analisa dan interpretasi hasil analisa yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi yang didasari atas hasil analisa.